

THAI PROTEST 2020: GAGALNYA SEBUAH UPAYA GERAKAN SOSIAL MELAWAN DOMINASI MILITER

Renada Elinna Carolinna^{1*}, Najamuddin Khairur Rijal², Muhammad Fadzryl Adzmy³
^{1,2,3}Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang,
Indonesia

*Korespondensi: elinnarenada@gmail.com

ABSTRACT

Thailand is a country known for its political instability. Thai students are arguably one of the most influential groups in this political instability. Since the Siamese Revolution of 1932, Thailand has faced 19 coups and 20 constitutional changes. The country is caught in a vicious cycle of coups and revolutions with its political institutions facing reform from the wave of democratization and military takeovers. This article will explain the pattern of the Thai Protest 2020 movement which is a social movement by students, activists, and students in Thailand who demand monarchical reform and resistance to military domination by using qualitative research methods and using the conceptualization of social movements. The results show that the Thai Protest 2020 has not succeeded in bringing about change in Thailand due to the lack of strategies and tactics due to the absence of a clear bureaucratic system during the movement.

Keywords: *Thai Protest 2020, Social movements, monarchy, Thailand*

ABSTRAK

Thailand merupakan negara yang terkenal dengan ketidakstabilan politiknya. Mahasiswa Thailand dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok paling berpengaruh dalam ketidakstabilan politik tersebut. Sejak Revolusi Siam 1932, Thailand telah menghadapi 19 kudeta dan 20 perubahan konstitusi. Negara ini terjebak dalam lingkaran setan kudeta dan revolusi dengan institusi politiknya menghadapi reformasi dari gelombang demokratisasi dan pengambilalihan militer. Artikel ini akan menjelaskan mengenai pola gerakan *Thai Protest 2020* yang merupakan gerakan sosial oleh mahasiswa, aktivis, hingga pelajar di Thailand yang menuntut reformasi monarki dan perlawanan terhadap dominasi militer dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan konseptualisasi gerakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Thai Protest 2020* belum berhasil membawa perubahan di Thailand akibat kurangnya strategi dan taktik dikarenakan tidak adanya sistem birokratisasi yang jelas selama gerakan.

Kata Kunci: *Thai Protest 2020, Gerakan sosial, monarki, Thailand*

PENDAHULUAN

Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dimana kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri sementara Raja hanya

sebagai kepala negara secara simbolis.

Namun, semenjak Raja Vajiralongkorn naik tahta menggantikan ayahnya, mendiang Raja Bhumibol, kini peran Raja semakin menguat dalam politik

pemerintahan Thailand. Selain itu, pemerintahan junta militer Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha yang dianggap sangat berbeda dengan pemerintahan junta militer sebelumnya juga menimbulkan perdebatan dengan lebih mendominasi birokrasi Thailand.

Kudeta yang dipimpin langsung oleh Prayuth Chan-Ocha pada 22 Mei 2014 atas nama *National Council for Peace and Order* (NCPO) atau Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, menjadi titik awal PM Prayuth Chan-Ocha mulai berkuasa (Kongkirati and Kanchoochat 2018). Prayuth mengambil alih kekuasaan dengan melakukan kudeta pada tahun 2014 atas pemerintahan Yingluck Shinawatra seorang perdana menteri wanita Thailand pada tahun 2011-2014 yang sekaligus merupakan saudara dari mantan PM Thaksin Shinawarta tahun 2001-2006.

Sebagai pemimpin kudeta, Prayuth ditunjuk langsung sebagai perdana menteri baru untuk Thailand. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan militer sangat mendominasi hingga banyak Jenderal yang berniat untuk memperluas kekuasaan. Kabinet pemerintahan Prayuth juga memiliki kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat yaitu dengan membatasi wewenang sipil, kebebasan berbicara dan larangan mengkritik serta larangan aktivitas-

aktivitas politik lainnya (Kongkirati and Kanchoochat 2018).

Gejolak di masyarakat kian meningkat ketika Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk membubarkan partai *Future Forward Party* (FFP) dan juga mendiskualifikasi oposisi, Thanathorn Juangroongruangkit pada pemilu 2019 (Thai Lawyers For Human Rights 2020). FFP sendiri telah dianggap sebagai partai politik dengan visi dan misi yang dapat membawa Thailand ke arah yang lebih baik tanpa mengesampingkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, keputusan MK tersebut sontak melukai banyak hati kaum muda di Thailand.

Dengan memanfaatkan momentum yang ada, pada Desember 2019, para pemuda di Thailand melakukan protes di depan Monumen Bangkok mengajukan berbagai tuntutan yang ditujukan langsung kepada kabinet pemerintahan militer PM Prayuth Chan-Ocha. Demonstrasi tersebut dikenal secara luas dengan sebutan *Thai Protest 2020*, yang merupakan gerakan pemuda di Thailand, khususnya mahasiswa, pelajar dan para aktivis, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi militer

dalam pemerintahan. *Thai Protest 2020* menjadi momen bersejarah sebagai demonstrasi dengan pelanggaran hukum *lese majeste* terbanyak semenjak pemerintahan Raja Bhumibol. Terdapat 98 kasus dakwaan pelanggaran *lese majeste* dan puluhan dari mereka telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman (Aljazeera 2020).

Tidak dapat dipungkiri mahasiswa memiliki peranan penting dalam ketidakstabilan perpolitikan di Thailand. Pada penelitian (Sripokangkul et al. 2019), yang meneliti mengenai determinan gerakan sosial mahasiswa di Thailand, menyatakan bahwa munculnya banyak aktivis mahasiswa di Thailand skala besar disebabkan oleh pergeseran kelembagaan penting di Thailand pada 1960-an. Selain itu, pendirian universitas-universitas daerah negeri yang baru juga memberikan dorongan atas lahirnya aktivis-aktivis di Thailand. Com (2019) juga menambahkan, gerakan mahasiswa yang fenomenal di era PM Prayuth Chan-Ocha yaitu kelompok Dao Din, juga memberikan dampak besar dalam pertumbuhan gerakan pemuda di Thailand. Dao Din juga dalam beberapa kesempatan berusaha untuk menciptakan gerakan masyarakat sipil yang menentang junta militer.

Phoborisut (2020) menegaskan kemunculan gerakan mahasiswa pada tahun 2020, telah membuat rakyat Thailand menghadapi kebutuhan kritis untuk menyelesaikan konflik dan perpecahan politik yang mengakar di Thailand. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perhatian publik terhadap aksi demonstrasi. Selain itu, (Sombatpoonsiri 2021), juga berpendapat bahwa gerakan mahasiswa tahun 2020 yaitu *Thai Protest 2020*, bisa saja menyebabkan *spill over* di negara-negara Asia, seperti halnya fenomena *Arab Spring*. Gerakan *Thai Protest 2020* memiliki jaringan yang luas dengan kelompok-kelompok sipil yang beragam yang dikoordinasikan secara fleksibel sembari tetap mempertahankan otonomi vis-à-vis untuk memprakarsai dan merancang aksi protes.

Lertchoosakul (2021), menjelaskan terkait salah satu gerakan para pelajar di *Thai Protest 2020*, yaitu *Tha White Ribbons*, menjelaskan bahwa motivasi para siswa menengah atas di Thailand dalam mengikuti *Thai Protest 2020* adalah dikarenakan siswa yang mengalami berbagai tekanan dan hambatan, namun justru Thailand tidak

memberikan solusi dari permasalahan tersebut karena sistem pendidikan yang terlalu lama beroperasi dengan tidak efektif. Masalah korupsi dan juga ketidaksetaraan juga menjadi motivasi besar para siswa menengah atas untuk mengikuti demonstrasi anti-pemerintah tersebut.

Secara umum, riset ilmiah yang hadir mengenai gerakan *Thai Protest 2020*, hanya berkisar kepada beberapa gerakan sosial di dalam *Thai Protest 2020* secara spesifik. Oleh karena itu, berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin mengisi *gap* tersebut dengan menjelaskan secara detail mengenai pola gerakan *Thai Protest 2020* secara keseluruhan, yang kemudian merujuk pada bagaimana gerakan tersebut mengalami kemundurannya. Artikel ini akan mengkaji mengenai pola gerakan *Thai Protest 2020* di Thailand, mulai dari tahap kemunculan, tahap penggabungan, tahap birokratisasi, hingga tahap penurunan atau kemunduran mereka.

Adapun kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan tahapan perkembangan *Thai Protest 2020* menggunakan konseptualisasi gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan entitas sosial terorganisir yang bersifat informal yang terlibat dalam sebuah konflik ekstra-institusional dengan berorientasi pada tujuan-

tujuan tertentu. Sujatmiko mengartikan gerakan sosial sebagai bentuk aksi kolektif yang cenderung konfliktual dan dilakukan oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Sementara, menurut Tarrow, gerakan sosial merupakan sebuah perlawanan kolektif oleh orang-orang dengan solidaritas tinggi dan memiliki tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan juga pihak yang berwenang (Sukmana 2016).

Kemudian, dalam perkembangannya, terdapat empat tahapan dalam proses terjadinya sebuah gerakan sosial menurut Herbert Blumer (Christiansen 2009). *Pertama*, Tahap Kemunculan (*Emergence*), dalam tahap ini, gerakan sosial dapat dikatakan masih awal dan hanya ada sedikit atau masih belum terbentuk organisasi. Sebaliknya tahap ini dapat dianggap sebagai proses dari rasa ketidakpuasan yang meluas. Partisipan dalam gerakan memiliki rasa tidak senang dengan beberapa kebijakan atau beberapa kondisi sosial yang ada, akan tetapi mereka tidak atau belum mengambil

tindakan apa pun untuk mengatasi keluhan tersebut.

Kedua, Tahap Penggabungan (*Coalescenes*), ditandai dengan perasaan ketidakpuasan yang lebih jelas. Pada tahap ini, kepemimpinan muncul bersamaan dengan strategi untuk menjalankan sebuah gerakan. Selain itu, pada tahap ini demonstrasi massa dapat terjadi untuk menunjukkan kekuatan sebuah gerakan dalam menyatakan tuntutan.

Selanjutnya, tahap ketiga yaitu Tahap Birokratisasi (*Bureaucratization*), tahap ini didefinisikan oleh Blumer sebagai "formalisasi," dengan ditandai oleh tingkat organisasi dan strategi berbasis koalisi yang lebih tinggi. Pada tahap ini, gerakan sosial telah mencapai beberapa keberhasilan karena mereka telah meningkatkan kesadaran sampai tingkat tertentu bahwa strategi yang terkoordinasi diperlukan di semua organisasi gerakan sosial. Gerakan sosial pada tahap ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan demonstrasi massa atau pemimpin yang menginspirasi untuk maju ke arah tujuan mereka, melainkan mereka harus mengandalkan staf terlatih untuk menjalankan fungsi organisasi.

Keempat, tahap terakhir yaitu Tahap Penurunan atau Kemunduran (*Decline*). Miller berpendapat, ada empat cara di mana gerakan

sosial dapat menurun, yaitu adanya Penindasan (*Repression*), Kooptasi (*Cooptation*), Keberhasilan (*Success*), dan Kegagalan (*Failure*). Represi terjadi ketika pihak berwenang, atau agen yang bertindak atas nama pihak berwenang, menggunakan tindakan yang mana seringkali tindak kekerasan, untuk mengontrol atau menghancurkan sebuah gerakan sosial. Kemudian, kooptasi terjadi ketika para pemimpin gerakan datang untuk berasosiasi dengan otoritas atau target gerakan lebih dari dengan konstituen gerakan sosial.

Keberhasilan gerakan sosial yang lebih kecil dan terlokalisasi dengan tujuan yang sangat spesifik seringkali memiliki peluang lebih baik untuk sukses. Banyak gerakan sosial memiliki tujuan yang kurang jelas dan banyak yang mengorganisir kampanye baru begitu yang lain selesai baik melalui keberhasilan ataupun kompromi. Terakhir adalah sebuah kegagalan yang disebabkan oleh dua alasan, yaitu faksionalisme dan enkapsulasi. Ketika sebuah gerakan sosial tumbuh, dengan sebagian struktur organisasinya terbuka di mana setiap orang dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan,

organisasi mulai dikendalikan oleh berbagai faksi yang beroperasi di dalam organisasi yang sayangnya bisa jadi untuk kepentingan organisasi luar (Blumer, 1969).

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif. Tipe penelitian deskriptif-kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan juga mendeskripsikan sebuah fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian deskriptif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya atau realita yang ada, bukan sebuah manipulasi atau perubahan pada variabel dan data yang diteliti. Menurut Mely G. Tan, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, gejala, fenomena, ataupun kelompok tertentu. Tipe penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi mengenai gejala sosial yang akan diteliti (Silalahi 2018).

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh dari buku, dokumen, jurnal, media elektronik dan lainnya yang semuanya mendukung kebutuhan penelitian. Karena itu, data yang digunakan

dalam penulisan adalah data sekunder yang bersumber dari pengumpulan data sumber tertulis (Silalahi 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Kemunculan *Thai Protest 2020*

Media sosial memiliki pengaruh besar dalam kesuksesan demonstrasi bersejarah *Thai Protest 2020*. *Thai Protest 2020* sendiri, pada awalnya dipicu oleh pembubaran Partai *Future Forward Party* (FFP) pada akhir Februari 2020 yang dianggap memiliki pandangan kritis terhadap pemerintahan Prayut, sehingga mendapat banyak perhatian oleh kaum muda di Thailand.

FFP memilih cara berkampanye yang modern dengan memanfaatkan media sosial, seperti *Twitter*, sehingga dapat menarik antusiasme kaum muda di Thailand. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi atas pembubaran partai FFP mendapat banyak kecaman kaum muda di Thailand yang kemudian menyebabkan demonstrasi besar di pusat kota Bangkok, dengan difasilitasi oleh media sosial.

Penyebab timbulnya kekecewaan kaum muda di Thailand yang memicu demonstrasi terbesar tersebut tidak hanya berasal dari

dibubarkannya FFP saja, melainkan faktor lain seperti kediktatoran pemerintahan PM Prayuth Chan-Ocha dan juga tingkah semena-mena Raja Vajiralongkorn. Pemerintahan militer PM Prayuth Chan-Ocha dianggap sangat represif, di mana kebebasan sipil dibatasi, kritik yang dapat dituntut dan juga larangan atas aktivitas politik. Semenjak kudeta, para jenderal telah memantapkan diri mereka sebagai elit penguasa baru dengan meningkatkan status, ruang lingkup kekuasaan, anggaran dan juga tenaga kerja mereka (Kongkirati and Kanchoochat 2018).

Sementara itu, Raja Maha Vajiralongkorn, semakin mengaburkan garis hak prerogatif kerajaan dan seringkali melakukan intervensi dalam politik. Raja meminta amandemen konstitusi dalam ketentuan yang berkaitan dengan kekuasaan kerajaan dengan mentransfer semua aset di bawah Biro Properti Mahkota yang diperkirakan mencapai \$30–60 miliar, ke kepemilikan tunggalnya. Kaum muda di Thailand kemudian mulai mempertanyakan kekuasaan kerajaan tersebut.

Selain itu, citra Raja Vajiralongkorn juga semakin tercoreng ketika Thailand dilanda efek serius akibat pandemi COVID-19 terhadap perekonomian mereka dan kemudian muncul berita utama internasional tentang

raja mereka yang hidup mewah di Jerman dengan 20 selirnya. Faktor-faktor inilah yang menjadi pemicu dan sebagai kekuatan pendorong di belakang protes kaum muda, khususnya mahasiswa hingga pelajar di Thailand dalam tujuan penting, yaitu reformasi monarki (Chachavalpongpun 2020).

Dalam perjalanannya, sebelum meletusnya demonstrasi gerakan *Thai Protest 2020*, media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook*, merupakan instrumen penting bagi masyarakat dalam mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah dan juga monarki. Bermula dari sebuah tagar di *Twitter* yang dibuat oleh kelompok *Free Youth Movements* (FYM), yaitu kampanye dengan tagar #FreeYouth (เยาวชนปลดแอก), pada November 2019 di grup *Facebook* yang mendapat banyak tanggapan positif dari kaum muda di Thailand. Tagar atau *hashtag* merupakan hal penting dalam mobilisasi politik karena dapat menghubungkan kata atau frasa tertentu dan membuat konten *online* dapat mudah untuk dicari serta dibagikan secara massal.

Tagar bukan hanya sebagai penanda signifikansi untuk masalah atau

peristiwa tertentu, akan tetapi mereka juga berfungsi sebagai alat penetapan agenda serta bingkai diskursif yang dapat digunakan untuk menciptakan identitas kolektif bersama. Halaman *Facebook Free Youth Movements* ini menjadi sebuah ruang virtual berpikir bebas bagi kaum muda di Thailand untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai masa depan negara mereka serta mencurahkan bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan juga monarki (Sinpeng 2021).

Tahap Penggabungan *Thai Protest 2020*

Setelah sukses mendapat antusiasme melalui media sosial, rasa ketidakpuasan tersebut kian nyata dan meluas. Ratusan pengunjung rasa berkumpul di Bangkok pada Februari 2020 sebagai buntut keputusan MK dalam membubarkan FFP. Selain itu, mereka juga menyerukan tiga tuntutan yang dikenal dengan *The Three Demands*, pada Juli 2020, yaitu *pertama*, pembuatan konstitusi baru di Thailand, *kedua*, menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap sistem monarki Thailand, dan *ketiga*, pembubaran parlemen PM Prayuth Chan-Ocha.

Demonstrasi tersebut difasilitasi oleh kelompok *Free Youth Movements*, yaitu sebuah kelompok advokasi pemuda yang merupakan kekuatan di balik beberapa protes anti-pemerintah terbesar yang dipimpin oleh

pemuda dalam sejarah kontemporer Thailand. Kelompok *Free Youth* didirikan oleh Tattap “Ford” Ruangprapaikitseree dan Panumas “James” Singprom. Kelompok *Free Youth* juga merupakan penggagas tagar *#FreeYouth* yang menjadi salah satu tagar yang paling banyak digunakan selama demonstrasi *Thai Protest 2020*, baik di *Twitter* maupun *Facebook*, yang digunakan sebagai alat mobilisasi selama demonstrasi berlangsung (Kri-aksorn 2020).

Selain kelompok *Free Youth Movement*, adapula *United Front of Thammasat and Demonstration* (UFTD) yaitu kelompok dari Universitas Thammasat, dan *Free People Group* (FPG). Kelompok UFTD merupakan penggagas dari “10 Tuntutan Reformasi Monarki”, sebuah proposal terbuka kepada monarki untuk mengubah beberapa konstitusi, termasuk penghapusan hukum *lese majeste*. Hukum *lese majeste* adalah larangan mencela Raja, Ratu dan keluarga serta pewaris hingga Bupati, yang tertera dalam konstitusi Thailand artikel 112 dengan hukuman 3 hingga 15 tahun penjara (Lawyer 2020).

Ketiga kelompok tersebut turut memfasilitasi lebih dari selusin protes anti-pemerintah skala besar yang menarik ratusan ribu peserta di seluruh Thailand antara Juli hingga Desember 2020. Kelompok-kelompok tersebut juga telah aktif dalam aktivitas politik dalam dukungannya kepada FFP serta perlawanan terhadap pemerintahan Prayuth dan juga monarki. Parit “Penguin” Chiwaruk, yang merupakan salah satu pemimpin UFTD, menggunakan media *Twitter* untuk mengkampanyekan Partai FFP mulai awal tahun 2018.

Demonstrasi yang didominasi oleh kelompok-kelompok gerakan pemuda Thailand, aktivis, mahasiswa, hingga pelajar tersebut, turun jalan menyuarakan tuntutan mereka dengan menggunakan simbol-simbol budaya populer seperti mengangkat tiga jari ke udara yang terinspirasi dari serial film “*The Hunger Games*”, dengan makna perlawanan terhadap pemerintahan diktator dan juga penindasan. Selama demonstrasi, terhitung 21 aktivis ditangkap dan 98 kasus dakwaan pelanggaran *lese majeste* hingga puluhan dari mereka telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman (Aljazeera 2020).

Tahap Birokratisasi Thai Protest 2020

Dengan adanya berbagai *platform* atau wadah untuk berdiskusi dan bertukar

pendapat, terciptalah sebuah koalisi antar kelompok-kelompok gerakan sosial pemuda selama protes. Media yang paling sering digunakan adalah *Twitter*, *Facebook*, hingga *Telegram*.

Kelompok *Free Youth Movements* menggunakan platform *New Gen Network*, yaitu organisasi pemuda yang berafiliasi dengan FFP di mana mereka belajar bagaimana mengatur kampanye advokasi secara *online*. Maka dari itu, melalui media sosial, dapat dikatakan kampanye *Free Youth Movements* dengan tagar *#FreeYouth* yang berulang kali mendapatkan jutaan keterlibatan, dapat dikatakan sukses dalam meningkatkan koalisi antar gerakan pemuda di Thailand, yang mana juga berhasil menyelenggarakan demonstrasi dengan lebih dari 10.000 massa di depan Monumen Demokrasi Bangkok. Demonstrasi tersebut menjadi sebuah demonstrasi terbesar dan bersejarah selama kepemimpinan militer dan monarki di Thailand (Sinpeng 2021).

Akan tetapi, sayangnya dengan koalisi yang tinggi tersebut, *Thai Protest 2020* tidak memiliki sebuah struktur organisasi ataupun kelompok

formal yang jelas di dalamnya (Issarachai 2020). Kelompok *Free Youth Movements* yang sebelumnya menjadi pelopor demonstrasi, tidak pernah mengklaim diri mereka sebagai pemimpin selama protes, selain hanya sebagai fasilitator.

Selama protes berlangsung, partisipan bersepakat dengan memutuskan bahwa gerakan *Thai Protest 2020* merupakan gerakan sosial tanpa pemimpin dengan menyerukan “*We are all leaders today*” atau ‘setiap orang merupakan pemimpin’. Hal tersebut merupakan tanggapan atas banyaknya pemimpin dan juga para aktivis dalam protes yang ditangkap oleh aparat di Thailand (Jha 2020).

Tidak adanya kepemimpinan yang terpusat merupakan aksi yang terinspirasi dari protes di Hong Kong. Meskipun terdapat beberapa tokoh utama selama demonstrasi, akan tetapi pengambilan keputusan tetap dilakukan serta dilimpahkan kepada pengunjung rasa atau partisipan dengan menggunakan forum *online* dan aplikasi berkirip pesan seperti Telegram. Akibatnya, penggunaan Telegram sempat meroket dalam beberapa hari di Thailand dikarenakan para pengunjung rasa yang menggunakannya untuk mengkoordinasikan aksi unjuk rasa sejak larangan pemerintah terhadap pertemuan

politik lebih dari empat orang diterapkan sebagai respon atas pandemi COVID-19.

Dapat disimpulkan bahwa *Thai Protest 2020* tidak memiliki sebuah struktur organisasi yang mengatur selama berjalannya gerakan, melainkan seluruh partisipan atau pengunjung rasa yang bekerja sama dalam menentukan strategi selama gerakan berlangsung, seperti simbol *flash mob*, yel-yel ataupun nyanyian, tempat berkumpul, hingga informasi mengenai titik-titik keberadaan aparat keamanan (Jha 2020).

Tahap Penurunan/Kemunduran *Thai Protest 2020*

Seiring dengan banyaknya aktivis sekaligus para pemimpin selama protes yang ditangkap dan juga tidak adanya struktur kepemimpinan yang jelas, mengakibatkan semakin melemahnya gerakan. Selain itu, dikeluarkannya dekrit pemerintah mengenai situasi darurat atas COVID-19 yang melarang adanya pertemuan lebih dari lima orang juga menjadi hambatan selama protes berlangsung. PM Prayut Chan-o-cha mengendalikan situasi tersebut selain demi keadaan

darurat juga bertujuan untuk membubarkan protes dan merebut kembali Gedung Pemerintah dari para demonstran (Issarachai 2020).

Bila menengok kembali kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1973 yang dikenal dengan “*Thai Popular Uprising*”, yaitu demonstrasi terbesar di Thailand yang berhasil mengorganisir 500.000 anggota masyarakat di luar Monumen Demokrasi. Gerakan tersebut berhasil mendapat perhatian Raja Rama IX dengan membuat pemerintah militer Thanom Kittikachorn mengundurkan diri. Protes ini, berhasil melakukan pergeseran politik Thailand menuju demokrasi (Waiwitlikhit 2020).

Maka dari itu, melihat keberhasilan “*The Popular Uprising*” dalam mencapai tujuan mereka, dapat dianalisis mengapa *Thai Protest 2020* mengalami kemunduran bila dibandingkan dengan protes mahasiswa pada tahun 1973. Penyebab kemunduran gerakan *Thai Protest 2020* yang utama adalah kurangnya desentralisasi kepemimpinan.

Kelompok mahasiswa dalam gerakan “*The Popular Uprising*” melakukan birokratisasi melalui *National Student Centre of Thailand* (NSTC), yaitu sebuah kelompok antar universitas yang menghubungkan kelompok-kelompok serikat mahasiswa di

seluruh negeri. Kelompok ini mengorganisir kegiatan non-politik antara masyarakat dan mahasiswa dengan mengumpulkan hingga 100.000 siswa pada musim semi tahun 1973. Organisasi terpusat kelompok ini memungkinkan proses mobilisasi terkoordinasi yang berhasil dari protes mahasiswa dan juga negosiasi dengan pemerintah. Sementara itu, *Thai Protest 2020* dikoordinasikan oleh lingkup *online* yang lebih kecil dan terdesentralisasi. *Thai Protest 2020* yang heterogen dan tanpa pemimpin, tidak memiliki tujuan yang terpadu dan badan yang terpusat untuk berunding atau bernegosiasi dengan pemerintah.

Selain itu, adanya faktor represi yang bertubi-tubi dari pemerintah juga menyebabkan melemahnya gerakan tersebut. *Thai Protest 2020* juga lemah akan legitimasi masyarakat umum bila dibandingkan dengan gerakan mahasiswa 1973. Hal tersebut dikarenakan status ‘mahasiswa’ sendiri yang mengalami penurunan legitimasi dari waktu ke waktu. Status mahasiswa pada tahun 1973 dianggap sebagai kaum elite di Thailand yang dianggap dan dipercaya dapat memberikan dampak serta perubahan yang konkrit di

Thailand, sehingga mereka mendapat kepercayaan rakyat menengah ke bawah. Sedangkan, pada tahun 2020, sangat umum untuk mendaftar di pendidikan tinggi. Realita tersebut menormalkan status mahasiswa dalam masyarakat sipil, dan dengan demikian, masyarakat umum sekarang semakin melihat mereka hanya sebagai kelompok sosial biasa.

Lebih dari itu, dalam protes tahun 1973 mayoritas masyarakat tidak puas dengan pemerintah. Sedangkan, pada protes tahun 2020 masih banyak basis oposisi yang kuat yang memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah militer. Gerakan *Thai Protest 2020* gagal menarik kaum konservatif dan monarki. Hal tersebut cukup berpengaruh besar dikarenakan faktor yang turut membantu keberhasilan gerakan mahasiswa adalah dukungan luas yang mereka peroleh dari masyarakat umum (Waiwitlikhit 2020). *Thai Protest 2020* dapat disimpulkan mengalami kegagalan (*failure*), dikarenakan struktur organisasi yang terbuka di mana setiap orang dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

SIMPULAN

Kurangnya strategi dan taktik selama gerakan menyebabkan *Thai Protest 2020* mengalami kemunduran. Mulai dari tahap penggabungan hingga kemundurannya, *Thai*

Protest 2020 memiliki satu kekurangan yaitu pada tahap birokratisasi yang tidak dilakukan atas dasar kebersamaan dan solidaritas. *Thai Protest 2020* tidak memiliki kepemimpinan terpusat selama aksi yang menjadi sebuah *boomerang* atas kegagalan gerakan tersebut. Para pemimpin kunci yang telah didakwa dan dipenjara tanpa jaminan, menyebabkan anggotanya mengalami demoralisasi. Meskipun dapat dikatakan belum berhasil memberikan sebuah perubahan, *Thai Protest 2020* memberikan sebuah harapan dan angin segar atas bangkitnya pola pikir kritis generasi muda untuk tidak bersikap apolitis dan untuk melawan segala bentuk penindasan. Berhasil maupun tidak dalam memberikan perubahan, *Thai Protest 2020* tetap menjadi sebuah momentum bersejarah di Thailand yaitu sebuah negara yang dapat dikatakan ‘langka’ dengan hukum *lese majeste* yang masih diterapkan dan juga lawan yang tidak biasa yaitu sebuah rezim militer yang kuat dan juga monarki. Adanya sebuah struktur birokrasi yang jelas sangatlah diperlukan dalam sebuah gerakan sosial mengingat hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilannya. *Thai Protest 2020* seharusnya memiliki

sistem pembagian kerja atau sebuah organisasi formal dengan model kepemimpinan terpusat sehingga gerakan dapat berjalan dengan baik dan terstruktur serta memiliki sebuah visi dan misi yang jelas. Hal tersebut juga dapat meningkatkan solidaritas dan meminimalisir sebuah perpecahan di dalam gerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. 2020. "Thailand's Lese Majeste Law." *Aljazeera*.
<https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/thailands-lese-majeste>.
- Blumer, H. 1969. *Collective Behavior*. New York: Barners and Noble Books.
- Chachavalpongpun, Pavin. 2020. "Constitutionalizing the Monarchy: Uncompromising Demands of Thai Protesters." *Journal of International Affairs* 73(2): 163–72.
https://utuvolter.fi/openurl/358FIN_UTUR/358FIN_UTUR:VU1??url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%253Aabiglobal&atitle=CONSTITUTIONALIZING+THE+MONARCHY%253A+UNCOMPROMISING+DEMANDS+OF+THAI+PROTESTERS&title=J.
- Christiansen, Jonathan. 2009. "Four Stages of Social Movements." *EBSCO Publishing Inc.:* 1–7.
<https://www.ebscohost.com/uploads/imported/thisTopic-dbTopic-1248.pdf>.
- Com, Thesocialsciences. 2019. "Interdisciplinary Civic and Political Studies THAILAND." *The International Journal of*
- Interdisciplinary Civic and Political Studies* 14(1): 45–60.
- Issarachai, Yutthaporn. 2020. "Loss of Protest Leaders 'Critical.'"
- Jha, Preeti. 2020. "Thailand Protest: Why Young Activists Are Embracing Hong Kong's Tactics." *BBC News* (October).
- Kongkirati, Prajak, and Veerayooth Kanchoochat. 2018. "The Prayuth Regime: Embedded Military and Hierarchical Capitalism in Thailand." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 6(2): 279–305.
- Kri-aksorn, Thammachart. 2020. "All You Need to Know about Thai Protest."
- Lawyer, Thailand. 2020. "Royal Family (Section 107-112) Criminal Code." *Thailand Law Library*.
<https://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-royal-family-sections-107-112/>.
- Lertchoosakul, Kanokrat. 2021. "The White Ribbon Movement: High School Students in the 2020 Thai Youth Protests." *Critical Asian Studies* 53(2): 206–18.
<https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1883452>.
- Phoborisut, Penchan. 2020. "The 2020 Student Uprising in Thailand : A Dynamic Network of Dissent." *ISEAS Perspective* (129): 1–10.
- Silalahi, Ulber. 2018. "Metode Penelitian." *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*: 216.

- Sinpeng, Aim. 2021. "Hashtag Activism: Social Media and the #FreeYouth Protests in Thailand." *Critical Asian Studies* 53(2): 192–205. <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1882866>.
- Sombatpoonsiri, Janjira. 2021. "From Repression to Revolt: Thailand's 2020 Protests and the Regional Implications." *German Institute of Global and Area Studies* 1(February): 1–12. <https://www.jstor.org/stable/resrep30227> Accessed: 27
- Sripokangkul, Siwach, John Draper, Charles David Crumpton, and Autthapon Muangming. 2019. "Understanding the Social Environment Determinants of Student Movements: A Consideration of Student Activism in Thailand and the Thai 'Social Cage.'" *International Journal of Asia-Pacific Studies* 15(1): 59–96.
- Sukmadinata, N. S. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*.
- Thai Lawyers For Human Rights. 2020. "Government Crackdown on the Right to Protest." *Article 19* (October): 1–25. <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/10/2020.10.25-Thailand-Protest-Briefing-final.pdf>.
- Waiwitlikhit, Pongsapak. 2020. "The Next Generation?: A Comparison between Thailand's 1973 Protests and Thailand's 2020 Protests." *International Journal of Humanities and Social Science* 10(12): 16–25.

PROFIL SINGKAT

Penulis lahir di Malang, 27 Januari 2000. Penulis terafiliasi dengan Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan penulis saat ini adalah sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang.